

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fraud akuntansi telah berkembang di banyak negara, tidak terkecuali di Indonesia, *fraud* akuntansi telah berkembang pesat dan luas yang mengakibatkan kerugian yang sangat besar hampir pada seluruh bidang. Persoalan *fraud* akuntansi di Tanah Air telah terjadi berulang kali. Menurut Dewi (2017), pada umumnya kecurangan akuntansi berkaitan dengan korupsi. Dalam korupsi, tindakan yang biasa dilakukan adalah memanipulasi pencatatan, penghilangan dokumen, dan mark-up yang merugikan keuangan atau perekonomian Negara. *Fraud* akuntansi bisa disebut sebagai tendensi korupsi dalam definisi dan terminologi yang disebabkan oleh keterlibatan beberapa unsur yang terdiri dari fakta-fakta yang sesat, melanggar aturan atau menyalahgunakan kepercayaan dan omisi fakta kritis.

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003, bahwa laporan keuangan adalah wujud pertanggungjawaban pemerintah daerah untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi manajemen keuangan daerah. Demi memberikan informasi keuangan yang bermanfaat untuk para pemakai dan pihak yang berkementingan, maka laporan keuangan sebaiknya harus disusun oleh orang-orang yang memiliki kompetensi pada bidang akuntansi keuangan daerah dan sistem akuntansi supaya terhindar dari kesalahan pencatatan atau kecurangan akuntansi atau *fraud*.

Indonesia merupakan Negara yang memiliki tingkat korupsi yang cukup tinggi di dunia yaitu peringkat 88 dari 168 negara (transparency internasional, 2015) , dan menurut hasil Failed State Index (2012), Indonesia berada di urutan 100 dari 182 negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa korupsi di Indonesia masih marak terjadi dan belum banyak berubah. Korupsi bahkan menjadi hal yang sangat sering dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kecurangan merupakan bentuk penipuan yang sengaja dilakukan sehingga dapat menimbulkan kerugian tanpa disadari

oleh pihak yang dirugikan tersebut dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan (Alison, 2006 dalam Rahmawati, 2012).

Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia paska reformasi adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah (Mardiasmo, 2009). Kecurangan akuntansi di Indonesia meningkat dengan adanya desentralisasi pengelolaan keuangan negara sampai ke level daerah. Menurut *Indonesia Corruption Watch (ICW)* ada sebanyak 576 korupsi, 1928 tersangka dengan nilai suap sebesar Rp211 milyar dan total kerugian negara sebesar Rp 1,2 triliun, penggelembungan (mark up) dan pungutan liar (pungli) dengan masing-masing 77 kasus dan 71 kasus, ICW juga menyebutkan bahwa lembaga yang tercatat paling banyak melakukan praktik korupsi adalah pemerintah kabupaten dengan 222 kasus dan kerugian negara sebesar Rp 1,17 triliun.

Korupsi adalah ancaman serius, terutama di Lampung sendiri dimana banyak dari sejumlah pejabat pemerintah, mulai dari eksekutif hingga legislatif dan pemerintah daerah hingga pusat tak luput dari pelaksanaan tindak korupsi. Sehingga pada akhir-akhir ini komisi pemberantas korupsi gencar untuk melakukan penyelidikan serta pengungkapan kasus terkait korupsi yang ada di provinsi Lampung. Kasus yang baru saja mencuat di wilayah Provinsi Lampung yaitu dimana sudah tercatat sebanyak lima bupati dan beberapa pegawai negeri sipil yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),

Penelitian ini dilakukan berdasarkan isu yang terjadi saat ini yang menjadi sorotan, salah satu kasus yang ada di Lampung terjadi di kabupaten Pesawaran. Salah satu contoh yang kasus dugaan korupsi yang terjadi adalah adanya penyelidikan dari Polres Pesawaran mengenai kasus korupsi pengadaan kapal di dinas perhubungan kabupaten Pesawaran. Pada akhir April 2019 lalu, ada beberapa orang yang dijadikan tersangka yaitu, Sri Andarwati selaku direktur CV RR Jaya sebagai pemenang tender proyek pengadaan kapal Dishub Pesawaran, kemudian Maddawami selaku mantan

kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran, Chandra Hadi atau Abu Chalifah tim PHO dan Ponirin sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran, dengan kerugian kurang lebih Rp.403 juta (Purnomo 2019). Pesawaran menjadi salah satu daerah paling rawan tindak korupsi di Lampung.

Definisi Kecurangan Akuntansi menurut Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) (2007) adalah suatu tindakan yang secara sengaja dilakukan meski berkesenjangan dengan hukum yang berbentuk penipuan pada pihak lain, guna memperoleh suatu hasil tertentu. Adapaun *Assosiation of Certified Fraud Examinations* (2004) Mengklasifikasikan Kecurangan Akuntansi dalam tiga kategori utama yaitu kecurangan laporan keuangan (*financial statment fraud*), penyalahgunaan aset (*asset missappropriation*) dan korupsi (*corruption*). Salah satu bentuk kecurangan atau fraud yang sering terjadi di Indonesia adalah korupsi. Persaingan dalam dunia pemerintahan yang dilandasi oleh unsur politik telah mempengaruhi pimpinan pemerintah melakukan kecurangan. Kecurangan pada dasarnya merupakan upaya yang disengaja untuk menggunakan hak orang lain untuk kepentingan pribadi. Kecurangan pada dasarnya merupakan upaya yang disengaja untuk menggunakan hak orang lain untuk kepentingan pribadi. Kecurangan umumnya terjadi karena tekanan untuk melakukan penyelewengan atau dorongan untuk memanfaatkan kesempatan yang ada.

Ketaatan pada aturan akuntansi adalah suatu kewajiban dalam setiap organisasi karena jika laporan keuangan yang disusun tidak sesuai atau tidak sesuai aturan akuntansi yang berlaku maka keadaan tersebut akan menumbuhkan perilaku yang tidak etis dan menyebabkan terjadinya *fraud* akuntansi (Shintadevi, 2015). Aturan akuntansi dijadikan pedoman bagi manajemen untuk melakukan kegiatan akuntansi dengan baik dan benar agar memberikan laporan keuangan yang efektif dan mampu menghasilkan informasi yang benar kepada pihak yang berkementingan. Penyebab lain yang bisa mempengaruhi terjadinya *fraud* akuntansi yang disebabkan adanya kesempatan yakni salah satunya adalah asimetri informasi.

Menurut Faramita (2011) dalam Virmayani, dkk (2017), asimetri informasi yaitu kondisi dimana salah satu pihak dari suatu transaksi memiliki informasi lebih baik dibanding pihak lainnya. Terdapat dua macam asimetri informasi, yaitu *adverse selection* dan *moral hazard* (Kusumastuti, 2012). Najahningrum (2013), menyatakan bahwa jika terjadi kesenjangan informasi antara pihak pengguna dan pihak pengelola, maka akan membuka peluang bagi pihak pengelola dana untuk melakukan kecurangan. Selain *fraud* akuntansi perilaku tidak etis dapat mempengaruhi terjadinya penyimpangan-penyimpangan di Indonesia. Perilaku tidak etis merupakan perilaku yang menurut keyakinan perseorangan dan norma-norma sosial dianggap benar atau salah. Menurut Wilopo (2006) dalam Shintadevi (2015), perilaku tidak etis dapat berupa penyalahgunaan kedudukan/posisi (*abuse position*), penyalahgunaan kekuasaan (*abuse resources*) serta perilaku yang tidak berbuat apa-apa (*no action*).

Menurut arens (2008:432) dalam (Sumbayak, 2017) penyebab terjadinya kecurangan disebut dengan segitiga kecurangan (*fraud triangle*) yaitu, tekanan atau insentif, kesempatan, dan rasionalisasi atau sikap. Yang pertama tekanan atau insentif yaitu situasi ketika manajemen atau pegawai memiliki insentif atau tekanan untuk melakukan kecurangan didalam sebuah organisasi. Kedua kesempatan yaitu situasi yang membuka kesempatan untuk manajemen atau personil untuk melakukan kecurangan disebuah organisasi. Ketiga rasionalisasi/sikap yaitu adanya serangkaian nilai-nilai etis yang membolehkan manajemen atau pegawai untuk melakukan tindakan yang tidak jujur. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi dan mencegah terjadinya sebuah kecurangan didalam sebuah organisasi salah satunya organisasi sektor publik yaitu dengan menjalankan ketaatan aturan adalah pelaporan apabila adanya perilaku tidak etis maupun tidak bermoral atau tindakan yang bertentangan dengan hukum yang dilakukan oleh pimpinan organisasi atau karyawan di organisasi tersebut sehingga hal tersebut dapat merugikan organisasi atau pihak-pihak yang memiliki kepentingan.

Pada penelitian ini penulis mereplika dari penelitian Miftahul Izza (2018). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah objek penelitiannya, pada penelitian sebelumnya mengambil objek OPD Pemerintahan Kota Makassar, sedangkan penelitian ini penulis mengambil objek OPD Pemerintahan Kabupaten Pesawaran. Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti “**Pengaruh Ketaatan Aturan dan Asimetri Informasi Terhadap *Fraud* Akuntansi dengan Perilaku Tidak Etis sebagai Variabel Moderating**”.

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian yang dilakukan supaya penelitian dan pembahasan lebih terarah agar hasilnya sesuai dengan harapan peneliti. Responden pada penelitian ini adalah dinas-dinas yang ada di Kabupaten Pesawaran.. Ruang lingkup yang dibahas pada penelitian ini tentang apakah pengaruh ketaatan dan asimetri informasi terhadap *fraud* akuntansi dengan perilaku tidak etis sebagai variabel moderating.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah ketaatan aturan berpengaruh terhadap *fraud* Akuntansi pada Pemerintahan Kabupaten Pesawaran ?
2. Apakah asimetri informasi berpengaruh terhadap *fraud* Akuntansi pada Pemerintahan Kabupaten Pesawaran?
3. Apakah perilaku tidak etis memoderasi hubungan ketaatan aturan terhadap *fraud* akuntansi pada Pemerintahan Kabupaten Pesawaran?
4. Apakah perilaku tidak etis memoderasi hubungan asimetri informasi terhadap *fraud* akuntansi pada Pemerintahan Kabupaten Pesawaran ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka bisa disimpulkan beberapa tujuan penelitian yaitu:

- a) Untuk membuktikan secara empiris pengaruh ketaatan aturan terhadap *fraud* akuntansi.
- b) Untuk membuktikan secara empiris pengaruh asimetri informasi terhadap *fraud* akuntansi.
- c) Untuk membuktikan secara empiris perilaku tidak etis memoderasi ketaatan aturan terhadap *fraud* akuntansi.
- d) Untuk membuktikan secara empiris perilaku tidak etis memoderasi asimetri informasi terhadap *fraud* akuntansi.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang bisa diperoleh dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a) Hasil Penelitian dapat dijadikan sumber referensi dan sebagai sumbangan konseptual bagi penelitian selanjutnya khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis IIB Darmajaya.
- b) Hasil penelitian dapat memperkuat penelitian yang sebelumnya tentu yang berkaitan dengan Fraud Akuntansi

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat pengetahuan tambahan tentang pengaruh ketaatan aturan dan asimetri informasi terhadap fraud akuntansi dengan perilaku tidak etis sebagai variable moderating pada pemerintahan Kabupaten Pesawaran.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam menyikapi kasus Fraud Akuntansi yang terjadi khususnya di bidang pendidikan serta sebagai sarana menambah pengetahuan akuntansi.

c. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan mahasiswa dalam penelitian selanjutnya serta mahasiswa dalam penelitian selanjutnya serta membantu mahasiswa dalam meningkatkan pemahamannya berkaitan dengan ilmu akuntansi dan penerapannya dalam kasus-kasus yang terjadi.

1.6 Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam skripsi ini akan disajikan dalam lima bab yang berurutan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisi uraian tentang teori-teori yang berkaitan dengan Fraud Akuntansi, Ketaatan Aturan, Asimetri Informasi Dan Perilaku Tidak Etis Sebagai Variable Moderating

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan tentang variabel-variabel penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang analisis menyeluruh atas penelitian yang dilakukan. Hasil hasil statistic di interpretasikan dan pembahasan dikaji secara mendalam hingga tercapai hasil analisis dari penelitian

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini penulis membahas secara singkat mengenai kesimpulan berdasarkan hasil analisis data, saran dan keterbatasan dari hasil penelitian ini.